

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akub, M.Sykri. 2013. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Ali, Zainuddin 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bawengan, G.W. 1987. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi.*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Eddyono, Sri Wiyanti. 2007. *Hak Asasi Perempuan dalam Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Arif Gosita, 1985. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekerasan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Irianto, Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo. 2006. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lubis, Todung Mulya. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Malinda, Anggun. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.

Margono. 2004. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Muhadjir. Neong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasih.

Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ngani, Nico I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman Republik Indonesia

Riyadi, Eko, Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Y sari Murti W, Sulistyowati Irianto, Setia Adi Purwanta, Hesti Armiwulan, Emil Ola Kleden, Yosep Adi Prasetya, Ahmad Suaedy, Budi Wahyuni, Suharsih, Mansur Zaki. 2012. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusham UII.

Smith, Rhona K.M. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.

Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudi. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Walklate, Sandra. 2001. *Gender, Crime, and Criminal Justice*. Portland, Oregon, USA: Willian Publishing.

Widhayanti, Erni 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta: Penerbit Liberty

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Moeljatno. 2007. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Skripsi/Penelitian/Jurnal

Amelda, 2018, Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Pekanbaru dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Diambil dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=156783&obyek_id=4 / (14 Oktober 2018)

- Arnita. I Nyoman. 2013. Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. Jakarta: Jurnal Media Neliti Vol. XXI/No.3/April-Juni 2013,
- Aryadi, G. 2002. Alternatif Penjatuhan Pidana sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen, Jurnal Hukum No.21 Vol. 9 September, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kurniawan, Novan Hendri. 2015. Skripsi: Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Surakarta. Diambil dari: <http://eprints.ums.ac.id/37825/> (7 April 2018)
- Kusumastuti, Indri. 2015. "Skripsi: Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan". Diambil dari: <https://anzdoc.com/peran-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-ppa-dalam-memberikan.html>. (14 Oktober 2018)
- Melissa, Julita. 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Jurnal Lex et Societatis: Vol.1, Manado: Universitas Sam Ratulangi Press.
- Mutaqqin, Farid Wajdi. 2017 Jurnal Hukum: Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resort Bondowoso. Diambil dari: [http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM M.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM%20M.pdf) (14 Oktober 2018)
- Nurdiani, Nina. 2014. Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. Jakarta: Jurnal Comtech Vol.5, No.2 Desember 2014, Bina Nusantara University.
- Yuana, Arum. Skripsi: Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort kota Yogyakarta (Unit PPA Polresta Yogyakarta) dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diambil dari: <http://eprints.uny.ac.id/52923/> (7 April 2018)

D. Kamus

- Umar, Dzulkifli. 2014. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama.

E. Website

Inatsan, Bestha. 490 Tahun Kota Jakarta, Refleksi Kondisi Kejahatan di Ibukota. Diambil dari: <http://mappifhui.org/2017/06/22/490-tahun-kota-jakarta-refleksi-kondisi-kejahatan-di-ibukota/>. (13 Maret 2018)

Jr, Leonard A. Sipes. Statistics on Women Offenders. Diambil dari: <http://www.corrections.com/news/article/30166-statistics-on-women-offenders>. (13 Maret 2018)

Mual, Dandy Idwal. Tahanan Perempuan yang Tidak Mendapatkan Hak-Haknya. Diambil dari: <https://www.bulaksumurugm.com/2017/03/08/tahanan-perempuan-yang-tidak-mendapatkan-hak-haknya/>. (1 Januari 2018)

Setyawan, Davit. Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak. Diambil dari: <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>. (13 Maret 2018)